



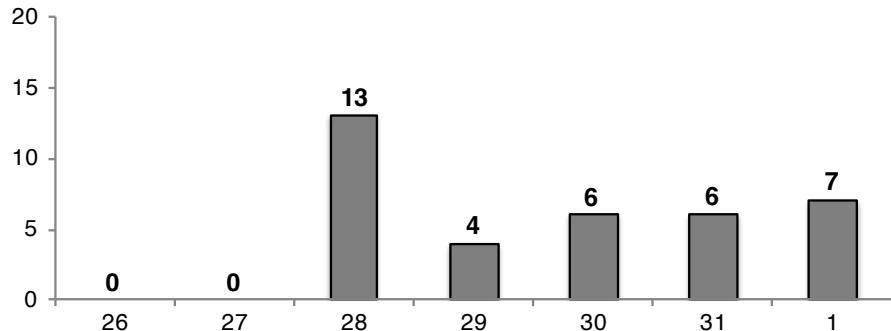
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(01 Agustus 2025)**

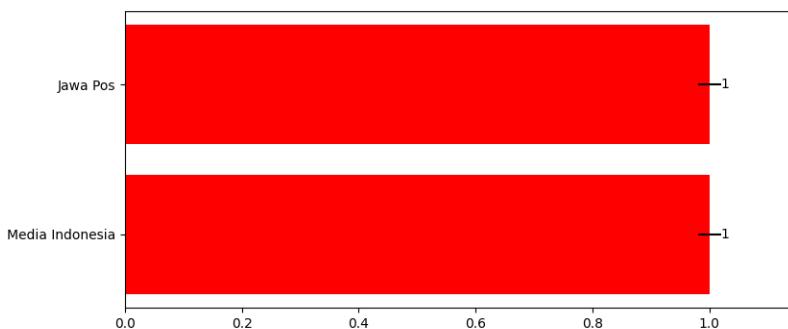
Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
5	7	7	0	0

Daily Statistic



Media Share



Influencers

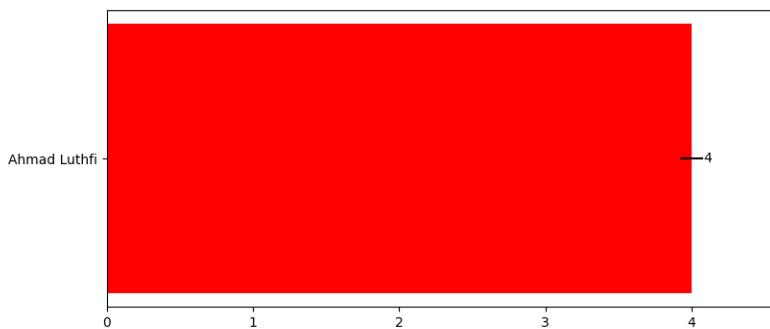


Table Of Contents : 01 Agustus 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	01 Agustus 2025	Jawa Pos	Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan	10	Positive	Ahmad Luthfi
2	01 Agustus 2025	Media Indonesia	Jateng Kekurangan 2.418 Unit Dapur SPPG	8	Positive	Ahmad Luthfi
3	01 Agustus 2025	Jateng Pos	MBG Jateng Kedua Nasional	12	Positive	
4	01 Agustus 2025	Radar Kudus	Jateng Masih Butuh 2.418 Unit Dapur SPPG	1	Positive	
5	01 Agustus 2025	Suara Merdeka	KEK dan Pemkab Kendal Raih Penghargaan Investasi Tertinggi di Jateng	3	Positive	
6	01 Agustus 2025	Suara Merdeka	Kemiskinan Turun, Bukti Keberhasilan Antar Instansi	9	Positive	
7	01 Agustus 2025	Suara Merdeka	Pemkab Blora Raih Penghargaan Investasi	15	Positive	

Title	Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan		
Media	Jawa Pos	Reporter	ant/dri
Date	2025-08-01	Tone	Positive
Page	10	PR Value	

Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

SEMARANG – Pemprov Jateng berupaya terus meningkatkan layanan kesehatan. Salah satunya menyediakan infrastruktur kesehatan berupa gedung untuk bangsal rawat inap di RSJD dr Amino Gondohutomo, Semarang.

Rumah sakit itu disiapkan untuk tiga lantai. Namun, sementara baru satu lantai yang selesai dan bakal dimanfaatkan untuk bangsal kegawatan jiwa.

"Insya Allah, dalam tahun berikutnya, kami bisa memenuhi lantai 2 dan 3," kata Direktur RSJD dr Amino Gondohutomo Alek Jusran seusai peresmian gedung tersebut kemarin (31/7).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berharap pembangunan bukan hanya fisik, melainkan juga berupaya mewujudkan pelayanan paripurna. "Bangunan baru ini diharapkan memotivasi para dokter untuk memberikan semangat baru kepada kita dalam mewujudkan pelayanan paripurna," tegasnya. (ant/dri)



HO-PEMPROV JATENG/ANTARA

PERESMIAN: Ahmad Luthfi didampingi Kepala Dinkes Jateng Yunita Dyah di RSJD dr Amino Gondohutomo, Semarang, kemarin (31/7).

Title	Jateng Kekurangan 2.418 Unit Dapur SPPG		
Media	Media Indonesia	Reporter	HT/SG/E-2
Date	2025-08-01	Tone	Positive
Page	8	PR Value	

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah masih membutuhkan sebanyak 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari 2.753 unit SPPG yang dibutuhkan di 35 kabupaten/kota, saat ini yang tersedia baru 335 unit.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mengakselerasi realisasi program MBG, dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh kabupaten/kota. Saat ini, kata Luthfi, Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional dengan total 335 SPPG aktif.

"Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu ada-

Jateng Kekurangan 2.418 Unit Dapur SPPG

lah kompartemen penting dalam mendukung program MBG," tegas Luthfi di sela rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jawa Tengah, di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Kamis 31 Juli 2025.

Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar. Sementara itu, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8% atau

953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.

Untuk mendukung program ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir

280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti Polri dan TNI.

"Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengembangan fungsinya ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama," tegasnya.

Untuk itu, Ahmad Luthfi mendorong enam langkah strategis yakni pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah,

perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan, pendataan dan validasi sasaran program, pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan, monitoring pasokan bahan baku, serta edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.

Lain lagi yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di sini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumedang baru menyentuh 17% dari total siswa di wilayah itu. Untuk itu, Pemkab Sumedang membentuk Satgas Per-

cepatan Program MBG dan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kecamatan.

"Angka 17% masih tergolong rendah. Untuk itu, kami mendorong para pelaku usaha lokal, seperti bandar beras, domba, ikan, hingga sayur, ikut berkontribusi membangun dapur gizi di desa-desa terpencil yang belum terjangkau," ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dia menambahkan pemenuhan gizi anak bukan sekadar urusan makanan, tapi menyentuh masa depan bangsa. Program MBG melalui dapur SPPG menjadi strategi utama dalam membangun generasi sehat, kuat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045. (HT/SG/E-2)

Title	MBG Jateng Kedua Nasional		
Media	Jateng Pos	Reporter	ucl
Date	2025-08-01	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

12



KOORDINASI MBG: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengadakan Rapat Koordinasi Program Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Badan Gizi Nasional di Gradhika Bhakti Praja kompleks kantor gubernur Jateng Jl Pahlawan Semarang. (31/7/25).

MBG, Jateng Kedua Nasional

Ahmad Luthfi: Sudah Beroperasi 335 SPPG Aktif se-Jateng

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mengakselerasi realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah. Dengan mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota.

Saat ini, kata Luthfi, Jawa Tengah memempuni posisi kedua secara nasional dengan total 335 SPPG aktif.

"Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah komponen penting dalam mendukung program MBG," tegas Luthfi.

Dari target 2.753 unit, SPPG yang sudah aktif baru 335, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 2.418 unit. Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.

"Kami mohon bantuan dari BGN atau teman-teman kabupaten/kota, kenapa masih banyak SPPG yang sudah dididiktar tapi belum aktif" ungkapnya dalam forum yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan MBG.

Sementara itu, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,6 persen atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Wilayah dengan capaian SPPG



AHMAD LUTHFI
(Gubernur Jateng)

Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengembangan fungsi ada di sini, mari kita buka pusat hara ini sangat penting. Kita tidak boleh keliru sasaran, jangan sampai seperti 'nembak tali salah lirik' lanjut Luthfi.

Untuk mendukung program ini, Pemprov Jateng telah menyalipkan

26 aset dengan luas total hampir

280 ribu meter persegi yang bisa

dimanfaatkan bersama-sama,"

tegasnya.

Berbagai kendala teknis juga

menjadi perhatian, seperti kurang-

nya edukasi prosedur menjadi

mitra SPPG, pengawasan sanitasi

dapur, dan pengelolaan limbah.

Untuk itu, Gubernur mendorong enam langkah strategis: pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendataan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangsa; monitoring pasokan bahan baku; serta edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.

Luthfi juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.

"Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota untuk

menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan

lebih mudah. Provinsi juga bisa

lebih cepat melakukan intervensi

bila diperlukan," tegasnya.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan

Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayuda, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi. Ia juga menegaskan keberadaan BGN kini memiliki payung hukum yang kuat.

"Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, halaf di luar kepala, dan instrusinya jelas," kata Dadang.

Ia menambahkan, hingga 28 Juli 2025 terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.

Rapat tersebut dibadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolida Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kabinda. Selain itu, turut hadir 35 kepala maupun wakil kepala daerah se-kabupaten/kota, lengkap bersama Dandim dan Kapoldes masing-masing, serta Jajaran OPD Provinsi Jateng yang terkait. (ucl)

Title	Jateng Masih Butuh 2.418 Unit Dapur SPPG		
Media	Radar Kudus	Reporter	lin
Date	2025-08-01	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

Jawa Pos

RADAR KUDUS

Inspiration of Change

HARGA ECRAN RP 7.000



GERAK CEPAT: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima rilis bersama BGN dan Bapak se-Jawa Tengah di Gedung Grahaika Bhakti Praja, Semarang, kemarin.

Jateng Masih Butuh 2.418 Unit Dapur SPPG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng), masih membutuhkan 2.418 unit raps. Satuan Pelaksana Pemrograman Gizi (SPPG). Selain itu, 2.733 unit SPPG yang ada saat ini masih belum terpasang, sementara yang tersedia hanya 335 unit.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mengakselerasi

realisasi program MBG, dengan memprioritaskan SPPG di seluruh kabupaten/kota.

Saat ini, Jawa Tengah menempati posisi

kedua teratas nasional dengan total 335

SPPG aktif. ► *Rachmawati*, *WPS*

Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena ini adalah komponen penting dalam mendukung program MBG."

AHMAD LUTHFI

Gubernur Jawa Tengah

Jateng Masih Butuh 2.418 Unit Dapur SPPG

Sambutan dari hal 1

SPPG terdiri dari lima kategori: Banyumas (32 unit), Blora (21), Cilacap (16). Setidaknya, daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Tambang, Magelang dan Banjarnegara masih belum terpenuhi dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.

Untuk mendukung program ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan 28 raps dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti Polri dan TNI.

"Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit. Aktivitas adu sesauan yang belum selesai. Maka untuk punya sumber daya manusia yang seluruh pengembangan fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbah itu bersama-sama," tegusnya.

Untuk itu, Ahmad Luthfi mendorong enam langkah strategis. Meliputi, pembaruan daya ekonomi dan keseimbangan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; per-

bantuan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendidikan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi; pangan; monitoring penyaluran bahan baku serta edukasi gizi dan kesehatan; dan pembiayaan makanan.

Luthfi juga mengayeksasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.

"Setelah rapat ini, segera realisasikan kepada wali kota untuk mendapatkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau semua kabupaten/kota sudah punya satgas, maka tentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta *problem solving* akan lebih mudah."

Untuk itu, Ahmad Luthfi mendorong enam langkah strategis. Meliputi, pembaruan daya ekonomi dan keseimbangan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; per-

baian dan koordinasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi. Ia juga menegaskan keberadaan BGN kini memudahkan penyaluran bantuan yang kuat.

"Saya senang dengan pihak-pihak seputar. Belau tegas, buat di luar kepala, dan ini ini yang tidak Dadiing la me ambau kan, bingga 28 Juli terdapat 2.378 SPPG asil di seluruh Indonesia, yang melayani 7.436.805 penerima manfaat. Dengan estimasi anggaran operasional Rp 111,55 miliar per hari atau Rp 2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan."

Rapat tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarmo, wakapolda Jateng, kasdam IV Diponegoro, dan kabinda. Selain itu, turut hadir 35 kepala daerah, wali kota daerah se-kabupaten/kota, lengkap bersama dandim, dan kapolda masing-masing, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jateng berkaitan. (lim)

Wilayah dengan rapsian

Title	KEK dan Pemkab Kendal Raih Penghargaan Investasi Tertinggi di Jateng		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ned-40
Date	2025-08-01	Tone	Positive
Page	3	PR Value	

KEK dan Pemkab Kendal Raih Penghargaan Investasi Tertinggi di Jateng

■ Realisasi Mencapai Rp 171,89 Triliun

JAKARTA - Berkat keberhasilan dalam merealisasikan investasi hingga Rp 171,89 triliun, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menerima penghargaan sebagai kawasan industri dan kabupaten dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025 yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (29/7).

KEK dinobatkan sebagai Kawasan Industri dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024, sedangkan Pemkab menerima penghargaan sebagai Kabupaten dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal mencatat realisasi investasi sebesar Rp 599 miliar, sebagai bagian dari

total realisasi investasi Kabupaten Kendal yang mencapai Rp 14,2 triliun. Namun secara kumulatif hingga Juni 2025, KEK Kendal telah berhasil menarik investasi masuk ke dalam kawasan sebesar Rp 171,89 triliun dengan total 128 pelaku usaha yang telah bergabung.

Peran strategis KEK terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintahan daerah, pengembangan infrastruktur kawasan, dan penyelenggaraan perizinan, sehingga mampu menarik minat investor di sektor manufaktur dan berorientasi ekspor. Executive Director PT Kawasan Industri Kendal (KEK Kendal) Juliiani Kusumaningrum menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diterima dan memberi penghormatan kepada semua pihak yang terlibat.

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemprov Jateng, Pemkab Kendal, para investor, hingga warga masyarakat

Kabupaten Kendal atas dukungan yang luar biasa selama ini," kata Juliiani.

Pencapaian ini, lanjutnya, merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang kuat semua pihak tersebut. "Untuk itu, KEK akan terus berkomitmen untuk menarik investasi strategis, khususnya di sektor industri hijau, energi terbarukan, otomotif ramah lingkungan, dan industri lainnya yang berkomitmen pada investasi yang berkelanjutan," tambahnya.

Kepala Administrator KEK Kendal Tjetje Karja Adil yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan, kemudahan dalam hal perizinan, insentif pembebasan pajak, serta berbagai insentif lainnya baik fiskal maupun nonfiskal menjadi faktor utama kenyamanan investor untuk berinvestasi di KEK Kendal.

"Kami telah menerapkan sistem pelayanan terpadu yang menjamin percepatan proses izin tanpa hambatan birokrasi. Hal inilah yang terbukti menjadi magnet yang mampu menarik para investor untuk

menanamkan modalnya di sini, baik investor asing (PMA) maupun lokal (PMDN)," jelasnya.

Pembangunan Berkelanjut

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari yang hadir untuk menerima penghargaan menyampaikan, pencapaian Kabupaten Kendal dan KEK Kendal secara bersamaan mencerminkan capaian strategi pembangunan daerah yang berkesinambungan.

"Prestasi ini bukan sekadar angka. Ini merupakan indikator bahwa sinergi antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mampu dan berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif," ungkapnya.

Dia pun menyatakan komitmenya untuk terus memperkuat infrastruktur, kualitas SDM, dan ekosistem UMKM agar dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat bisa makin luas.

Menurutnya, sinergi yang efektif antara pengelola kawasan, adminis-

trator KEK, dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam mendongkrak pertumbuhan investasi yang nyata.

"KEK Kendal bersama Pemerintah Kabupaten Kendal kini menjad

di contoh nyata bagaimana koordinasi yang selaras dan berkelanjutan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menarik kepercayaan investor," pungkasnya. (ned-40)



SM/ok

BERSAMA GUBERNUR: Para pimpinan KEK Kendal berfoto bersama Gubernur Jateng Ahmad Lutfi setelah menerima penghargaan dalam acara Central Java Investment Business Forum 2025, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (29/7). (40)

Title	Kemiskinan Turun, Bukti Keberhasilan Antar Instansi		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd-25
Date	2025-08-01	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Kemiskinan Turun, Bukti Keberhasilan Antarinstansi

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat keberhasilan dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jateng pada Maret 2025 turun menjadi 9,48%, dibandingkan pada September 2024 di angka 9,58%.

Penurunan itu merupakan hasil dari berbagai program terpadu lintas sektor yang dijalankan Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antarinstansi, mulai dari pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.

Pt Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningish, mengatakan, penurunan tersebut merupakan bentuk nyata dari keberhasilan program-program yang dilaksanakan secara kolaboratif. "Ini tidak bisa bekerja secara sektoral. Harus satu data, satu arah," ujarnya, baru-baru ini.

Beberapa faktor pendorong penurunan angka kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I 2025 yang mencapai 1,8%. Hal itu menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua secara nasional, setelah Maluku Utara.

Adapun kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jateng berasal dari sektor industri dan sektor pertanian pada triwulan I. Hal itu menyumbang pertumbuhan signifikan, juga menjadi pilar penting dalam mengerakkan ekonomi daerah.

"Fokus Bapak Gubernur pada keta-

hanan pangan turut berdampak positif terhadap pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan. Produksi padi pada triwulan I 2025 mencapai 2,94 juta ton gabah kering giling, naik signifikan dibandingkan periode sebelumnya 2,55 juta ton," jelas Endang.

Peningkatan Investasi

Penurunan kemiskinan juga tidak lepas dari peningkatan investasi. Pemerintah mendorong pertumbuhan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang dan Kawasan Industri Kendal, yang mulai menunjukkan hasil melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kegiatan eksport-impor. "Investasi juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan," tuturnya.

Endang menambahkan, Pemprov kini mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), guna memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.

BPS mencatat, pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah turun 29,65 ribu orang menjadi 3,367 juta jiwa atau 9,48 persen. Jumlah ini menurun 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang pada saat itu mencapai 9,58 persen.

Dia juga mencatat sejumlah fenomena sosial turut menyumbang penurunan jumlah penduduk miskin di Jateng. Di antaranya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat 4,33 persen, turun bila dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat 4,78 persen.

Sementara, dibandingkan dengan periode yang sama pada Februari 2024, saat itu jumlahnya mencapai 4,39 persen.

Disamping itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bergerak positif 4,96 persen, pada triwulan I 2025 (YoY), lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 4,87 persen.

Selain itu, inflasi pada Maret 2025 cenderung terjaga pada angka 0,75 persen dibanding September 2024 yang mencapai 1,57 persen. (ekd-25)

Title	Pemkab Blora Raih Penghargaan Investasi		
Media	Suara Merdeka	Reporter	H18-88
Date	2025-08-01	Tone	Positive
Page	15	PR Value	

Pemkab Blora Raih Penghargaan Investasi

Mustikane Blora



BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora meraih penghargaan berharga dalam ajang Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025. Penghargaan diberikan atas pencapaian nilai investasi tertinggi selama 2023-2024.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Bupati Blora Arief Rohman di acara CJIBF 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/7). Hadir di acara itu, sejumlah kepala daerah, pelaku usaha nasional, serta perwakilan dari sembilan negara sahabat.

Gubernur Ahmad Luthfi dalam paparannya, Gubernur Jawa Tengah mengumumkan 15 proyek prospektif yang ditawarkan kepada investor nasional maupun internasional. Sa-

lah satunya berasal dari Kabupaten Blora, yakni Proyek Pengembangan Waduk Greneng di Kecamatan Tunjungan. Proyek tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dan sumber daya air.

Masuknya Kabupaten Blora dalam daftar 15 proyek prospektif ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus mendorong promosi potensi daerah, khususnya sektor wisata yang bisa menarik minat para investor," ujar Bupati Arief Rohman usai menerima penghargaan.

Intensifikasi Investasi

Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan intensifikasi investasi ke berbagai sektor potensial, termasuk tidak menutup kemungkinan di sektor minyak dan gas (min-gas). Dia juga mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha di Blora untuk terlibat dalam pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), yang merupakan bagian penting dalam pengukuran capaian investasi daerah.

"Masih ada beberapa

sektor seperti industri kayu dan peternakan yang belum sepenuhnya rutin melaporkan kegiatan usahanya secara periodik. Ini akan menjadi perhatian kami ke depan," tegas Bupati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Blora, Bondan Arsiyanti, menyampaikan penghargaan ini diraih karena nilai pelaporan investasi (LKPM) yang meningkat signifikan. Berdasarkan data, target nilai investasi Blora 2023 sebesar Rp80 miliar tercapai sebesar Rp 205,63 miliar. Sedangkan pada 2024, target investasi sebesar Rp 620 miliar berhasil dilampaui dengan capaian Rp798,38 miliar. "Ini menunjukkan kinerja yang positif dan keseriusan kami dalam mendampingi investor serta mendorong iklim usaha yang sehat di Blora," kata Bondan.

Sektor pengembangan sumber daya gas di Blora yang sedang dalam proses perizinan diharapkan akan segera tercapai dalam waktu dekat. "Harapan kami, tren pertumbuhan investasi ini terus berlanjut dan bisa melampaui target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 800 miliar untuk tahun 2025," tambah Bondan Arsiyanti. (H18-88)

NTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN CAPAIAN SALISASI INVESTASI TERTINGGI TAHUN 2024



PERSENTRITINGGI

PENGHARGAAN: Bupati Blora Arief Rohman menerima penghargaan bidang investasi yang diserahkan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Jakarta, Selasa (29/7). (88)

SM/Abdul Muiz